

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

INSTRUKSI

Nomor : 55 Tahun 1978

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN SELURUH PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II  
KE KAS PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

: Bawa sehubungan dengan kenyataan mengenai tata laksana penerapan dan penyetoran pendapatan Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang dilaksanakan sampai sekarang oleh Dinas-Dinas / Sub Direktorat/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur masih mengalami hambatan dalam rangka pemasukannya ke Kas Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menginstruksikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk mengadakan peneriban serta penyeragaman pada mekanisme penyetoran pendapatan Daerah dimaksud khususnya pendapatan retribusi Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- : 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 ;
- : 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 ;
- : 4. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
- : 5. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1958 ;
- : 6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1978 Nomor 57 tahun 1978.

MERHATTIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KURD. 36/17 tentang penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MENGINSTRUJSIKAN

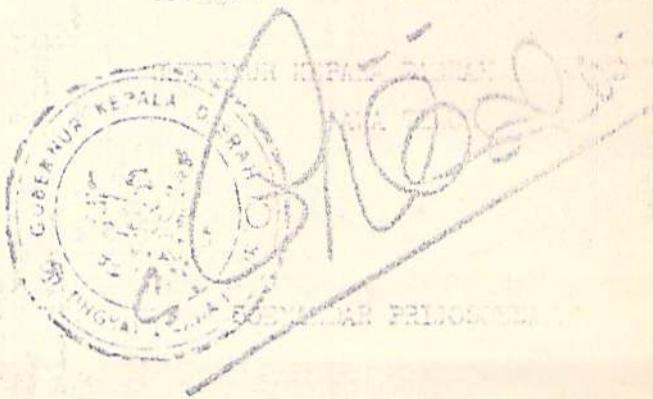
A.D.A : Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

K T U K : Melaksanakan tata cara penyetoran hasil pemungutan selama peliputan Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas/Duri-Durian/Kantor/Instansi yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan daerah Tingkat II ke Kas Pemerintah Kabupaten/Kota dan daerah Tingkat II, sesuai dengan tata cara penyetoran yang berada dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1978 Nomor 57 tahun 1978.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluaran, untuk dilaksanakan dan selanjutnya.

Dikeluaran di : Surabaya

Tanggal : 21 Desember 1978



MAN Instruksi ini dicapaiakan  
masa :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di se-Jawa Timur.

23 des 78 205